



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 152/180/2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR
10/180/2025 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka penambahan Rancangan Peraturan Walikota Pariaman ke dalam daftar Program Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Pariaman Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 10/180/2025 Program Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Pariaman Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR 10/180/2025 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN TAHUN 2025.

KESATU : Sebanyak 5 (lima) Rancangan Peraturan Wali Kota ditambahkan ke dalam daftar Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 2 Mei 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKIDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PENETAPAN DAN KEPEMILIHAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	12/4/25
PETRANCANG PERATURAN DAERAH	14/4-25

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 152 /180/2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI
KOTA PARIAMAN NOMOR 10/180/2025
TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
PARIAMAN TAHUN 2025

DAFTAR PENYUSUNAN RANPERWAKO TAHUN 2025

No.	Nama Ranperwako	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan dan Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup, dan Objek Pengaturan	Sasaran dan Target Waktu Penyelesaian
31.	Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2025.	DPMD	Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dasar Hukum: Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025	Perubahan Pembagian Alokasi Dana Desa kepada Setiap Desa di Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025.	Pemerintah Kota Pariaman. Juli 2025
32.	Pedoman Pemberian Izin Belajar Khusus Bagi Perangkat Desa	DPMD	Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa	Pedoman Pemberian Izin Belajar Khusus Bagi Perangkat Desa	Pemerintah Kota Pariaman. Juli 2025
33.	Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman	Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah. Dasar Hukum: Permendagri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.	Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Operasional Tahun 2025 Untuk Seluruh OPD	lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Mei 2025
34.	Biaya Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pariaman	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab Kepala Daerah dan Wakil Kepala	Menyediakan landasan hukum yang jelas mengenai penggunaan belanja rumah tangga Jabatan	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Mei 2025

No.	Nama Ranperwako	Pemrakarsa	Latar Belakang Penyusunan dan Dasar Hukum	Materi Pokok, Ruang Lingkup, dan Objek Pengaturan	Sasaran dan Target Waktu Penyelesaian
			Daerah Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
35.	Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman	DPRD	Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.	Penyusunan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD Kota Pariaman	Pemerintahan Kota Pariaman Mei 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKIDANO PARLIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAH DAN KEPERLUAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	P 22/11-25
PERANCANG PERATURAN PERUNTUKAN UNDANGAN	4-25